

# PROSIDING Seminar Nasional



*Hasil Penelitian Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*

**SNHPIA**

Gorontalo, 28-29 November 2015

**MEMBANGUN BANGSA  
DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK**



*Editor:*

**Dr. H. Zuchri Abdussamad, M.Si**

**Dr. Arifin Tahir, M.Si**

**ISBN : 978-979-1340-97-7**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**



**Universitas Ngurah Rai**

# HARMONISASI JARINGAN SOSIAL SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

Ismet Sulila  
Universitas Negeri Gorontalo

## Abstrak

Kajian ini lahir berdasarkan situasi sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo yang majemuk terdiri dari berbagai suku termasuk suku Gorontalo sebagai suku asli yang mendiami daerah ini. Kajian ini dilaksanakan melalui dua tahapan selama dua tahun. Dua fokus yang dikaji pada tahap pertama, 1) bagaimana kondisi interaksi jaringan sosial masyarakat di Kabupaten Boalemo, 2) faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) kelompok sosial di kabupaten Boalemo dibentuk oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi yang disuarakan dari wilayah tersebut, baik untuk menyuarakan kepentingan ekonomi, keagamaan politik, sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan, seni dan sosial budaya. Interaksi jaringan sosial di Boalemo terbentuk melalui sosial kontrol yang dilakukan dalam pertemuan rutin dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk melakukan diskusi berbagai masalah pembangunan di wilayah Kab. Boalemo. 2) Berbagai faktor yang dapat mendukung konsep harmonisasi jaringan sosial di daerah ini meliputi : a) kekeluargaan, b) perhatian pemerintah, c) pembinaan kelompok sosial. Sedangkan faktor yang dapat menghambat adalah egoisme sektoral di masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci : *Harmonisasi, Jaringan sosial dan Pelayanan Publik*

## PENDAHULUAN

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintah telah membawa konsekwensi yang luas bagi lembaga pemerintah di tingkat pusat hingga daerah. Hal ini tercermin dalam tekad penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom dan terdesentralisasi, ketimbang dengan paradigma lama yang semuanya serba terpusat dan dibawah kendali langsung dari pemerintah pusat. Konsep desentralisasi secara populer diartikan sebagai pemberian/mendelegasikan wewenang dari atasan (pemilik wewenang) kepada bawahan (pelaksana). Sementara itu otonomi mengandung makna kemandirian. Mandiri dalam konteks ini adalah kebebasan untuk memilih dan menyelenggarakan pemerintah yang disertai dengan kemampuan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah tersebut telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah

terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam keberadaannya sebagai salah satu daerah otonom menuju pemerintahan daerah yang mandiri berdasarkan semangat otonomi daerah melakukan pembenahan disemua lini pemerintahan termasuk dalam upaya terus meningkatkan efektifitas layanan public di daerah ini. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah ditetapkan dalam pola dasar pembangunan daerah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2001 yang menjadi landasan berpijak dalam rangka melakukan pembangunan yang disusun melalui sektor program unggulan yang terdiri dari: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) peningkatan sumber daya manusia, 3) peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 4) penunjang sector unggulan, 5) peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Implementasi kelima sektor unggulan di atas ternyata masih diperhadapkan pada kondisi tertentu sehingga belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi di daerah. Berbagai masalah yang masih dihadapi di daerah ini adalah sebagai berikut: 1) banyak wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan, 2) belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, 3) wilayah terpencil kondisinya masih terkebelakang. Oleh karena itu untuk mengefektifkan penanganan berbagai masalah di atas maka dikelompokkan menjadi lima aspek masalah, yaitu: 1) permasalahan berkaitan dengan pengembangan ekonomi local, 2) permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, 3) permasalahan berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, 4) permasalahan berkaitan dengan keterisolasian, 5) permasalahan berkaitan dengan karakteristik daerah.

Ditinjau dari perspektif keamanan dan ketertiban, kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan komponen utama dalam menjaga ketertiban hukum, tertib sosial, tertib ekonomi, yang nantinya menjadi faktor utama dalam penyangga keamanan setempat. Aman dapat berarti masyarakat dapat terbebas dari ancaman baik tindakan kriminal maupun ancaman lainnya. Selain itu, aman mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Sedangkan damai mengandung arti tidak ada konflik, kerusuhan, tidak bermusuhan serta hidup rukun hingga dapat mewujudkan keharmonisan yang membawa pada lancarnya agenda pembangunan. Masyarakat Boalemo sendiri tidak memiliki budaya kekerasan yang selalu menghadapi konflik antar komponennya. Ketegangan dalam hubungan memang terjadi bila menyikapi suatu kebijakan, tapi pihak eksekutif selalu berkontak dengan komponen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang sebagai dijelaskan di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1). Bagaimana kondisi interaksi jaringan masyarakat di Kabupaten Boalemo?
- 2). Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung maupun menghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di Kabupaten Boalemo?

## LANDASAN TEORITIS

### 1. Kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks sosial, jejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menyatu dengan manusia lain di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana sekelilingnya (Basrowi:2005:49). Selanjutnya untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut di atas, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soekanto (2002:10) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat sebuah kelompok sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1) setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan, 2) ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, 3) ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, 4) berstruktur, berkaidah mempunyai pola perilaku, 5) bersistem berproses.

Disamping kelompok-kelompok sosial sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks kelompok sosial dikenal juga adanya Paguyuban menurut Ferdinand Tonnies dan Charles P. Loomis (dalam Basrowi:54) paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, dimana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dalam hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan ba

yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Paguyuban terutama dapat dijumpai dalam keluarga kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya. Suatu paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok berikut, yaitu 1) intimate, hubungan meneluruh yang mesra, 2) private, hubungan yang bersifat pribadi, 3) exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang-orang diluar "kita".

Dalam konteks kelompok sosial sebagaimana dijelaskan di atas kelompok sosial yang ada di Kabupaten Boalemo juga telah terbentuk. Namun berbagai kelompok tersebut lebih nampak terlihat dalam bentuk asosiasi warga yang terbentuk dalam berbagai bentuk organisasi masyarakat, dimana data awal yang diperoleh sampai dengan tahun 2007 kelompok-kelompok sosial ini telah berjumlah 33 kelompok sosial. Kelompok sosial ini jelas memiliki jaringan dan basis masa yang jumlahnya bervariasi. Dalam kondisi ini, hal yang menarik adalah kelompok-kelompok ini dibentuk diantaranya dengan maksud memperjuangkan aspirasi dan tujuan anggota kelompok yang bersangkutan. Disisi lain dalam mewujudkan "Boalemo Bertasbih" pemerintah memberi ruang gerak terhadap *civil society* (masyarakat madani), dimana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Dalam ruang tersebut masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

## 2. Pelayanan Publik (*Public Service*)

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat istilah ini dipakai sebagai terjemahan dari *public service*. Hal ini dapat

dilihat dalam dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam kajian ini, administrasi pemerintahan disejajarkan atau disamakan pengertiannya dan penggunaannya sebagai sinonim dari pelayanan perizinan, yang merupakan terjemahan *administrative service*. Sedangkan pelayanan umum lebih sesuai jika dipakai untuk menerjemahkan konsep *public service*. Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai berikut :

"Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN No. 63/2003).

Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa

pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 1999). Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Widodo Joko, 2001). Sedangkan Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Hubungan antara Jaringan Sosial dan Pelayanan Publik**

Dalam konteks penelitian ini jaringan sosial dipandang sebagai hal pokok yang turut menentukan dan berkontribusi dalam pelayanan publik di suatu daerah. Hal ini dapat dilandasi dengan argumentasi mendasar bahwa satu lingkungan sosial di daerah akan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik apabila didukung oleh situasi sosial masyarakat yang aman dan kondusif. Dalam survey yang dilakukan oleh BPS setempat diperoleh data

jumlah penduduk 109.868 jiwa yang terdiri beberapa suku atau etnis (Shod Nursa:2007:70). Selain itu pula dinamika masyarakat yang kompleks dan plural membentuk kelompok-kelompok sosial, dimana di daerah ini dikenal dengan nama masyarakat madani (*civil society*).

Data perkembangan sosial tersebut menunjukkan 33 kelompok sosial yang terbentuk. Banyaknya kelompok sosial ini turut memberikan warna tersendiri dalam partisipasi pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana kemampuan daerah dalam membangun sinergi antara sesama kelompok sosial sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Bila mengacu pada kasus beberapa daerah lain, kelompok sosial yang tidak memiliki hubungan yang kondusif justru akan membawa daerah tersebut dalam situasi perpecahan yang tidak diinginkan, akibatnya pembangunan dan pelayanan publik di daerah berjalan dengan lamban bahkan semakin jauh dari keberhasilan. Dengan kata lain bahwa harmonisasi jaringan sosial di daerah harus mampu dibangun dengan lebih baik karena kelompok tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

### **METODE**

Kajian penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terhadap harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Prosedur penelitian ini akan dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sanafai Faisal (2005:256). Disamping itu pula, untuk

memperdalam hasil kajian, pada setiap tahapan penelitian ini akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pihak terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam konteks melakukan harmonisasi terhadap berbagai jaringan sosial yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan awal yang akan dilaksanakan adalah observasi dan koleksi data awal di lapangan, yang berkaitan dengan fokus dan sub fokus kajian harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya data awal yang dapat memperjelas kegiatan penelitian yang difokuskan pada Pemahaman secara mendalam mengenai konsep harmonisasi sosial yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah kajian terhadap berbagai faktor pendukung maupun penghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di daerah berdasarkan hasil kajian pada tahap pertama. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya rancangan harmonisasi jaringan sosial berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang ada di daerah ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Hasil Kajian Komprehensif kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo

Perkembangan sebuah daerah salah satunya ditunjukkan oleh banyaknya aktifitas masyarakat dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Ditengah banyaknya kepentingan yang harus diperjuangkan, maka di daerah ini telah terbentuk sejumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial, dimana masing-masing kelompok sosial

ini memiliki tujuan akan pembentukannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai tentu adalah memperjuangkan aspirasi kepentingan kelompok masing-masing, ataupun untuk mengungkapkan berbagai kritik dan saran kepada penyelenggara pemerintahan.

Ditinjau dari banyaknya jumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial di Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2012 berjumlah 52 (lima puluh dua) kelompok sosial. Jumlah ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan, yaitu Talamuta, Paguyaman, Wonosari, Manunggu, Paguyaman Pantai, Wonosari, Botumoito dan Dulupi. Sedangkan bila ditinjau dari bidang kegiatan yang dilaksanakan meliputi ekonomi informal, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Bila dilihat dari bentuk organisasi yang dibentuk di wilayah ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menjalankan misi organisasi, sebagian besar jaringan sosial memperjuangkan aspirasi mereka melalui dan atas nama organisasi tempat mereka berkumpul. Adapun aspirasi yang seringkali disampaikan adalah menyangkut kritikan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, memperjuangkan berbagai program pembangunan di wilayah desa/kecamatan masing-masing, pengajuan kegiatan di wilayah desa/kecamatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, dan tuntutan terhadap perhatian pemerintah terhadap perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah.

Jika dilihat dari aspirasi yang disampaikan di atas sifatnya lebih bersifat normatif, yaitu memperjuangkan kepentingan anggota kelompoknya dan masyarakat tempat dimana organisasi/kelompok sosial ini berada. Hal ini dilakukan dengan harapan penyampaian berbagai aspirasi dan kepentingan melalui

memperdalam hasil kajian, pada setiap tahapan penelitian ini akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan seluruh pihak terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam konteks melakukan harmonisasi terhadap berbagai jaringan sosial yang ada di Kabupaten Boalemo sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kegiatan awal yang akan dilaksanakan adalah observasi dan koleksi data awal di lapangan, yang berkaitan dengan fokus dan sub fokus kajian harmonisasi jaringan sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik di Kabupaten Boalemo. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya data awal yang dapat memperjelas kegiatan penelitian yang difokuskan pada Pemahaman secara mendalam mengenai konsep harmonisasi sosial yang akan dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah kajian terhadap berbagai faktor pendukung maupun penghambat terbangunnya jaringan sosial yang kondusif di daerah berdasarkan hasil kajian pada tahap pertama. Hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya rancangan harmonisasi jaringan sosial berdasarkan faktor pendukung dan penghambat yang ada di daerah ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 1. Hasil Kajian Komprehensif kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo

Perkembangan sebuah daerah salah satunya ditunjukkan oleh banyaknya aktifitas masyarakat dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraannya masing-masing. Ditengah banyaknya kepentingan yang harus diperjuangkan, maka di daerah ini telah terbentuk sejumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial, dimana masing-masing kelompok sosial

ini memiliki tujuan akan pembentukannya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai tentu adalah memperjuangkan aspirasi kepentingan kelompok masing-masing, ataupun untuk mengungkapkan berbagai kritik dan saran kepada penyelenggara pemerintahan.

Ditinjau dari banyaknya jumlah kelompok sosial ataupun jaringan sosial di Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2012 berjumlah 52 (lima puluh dua) kelompok sosial. Jumlah ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan, yaitu Tilamuta, Paguyaman, Wonosari, Manunggu, Paguyaman Pantai, Wonosari, Botumoito dan Dulupi. Sedangkan bila ditinjau dari bidang kegiatan yang dilaksanakan meliputi ekonomi informal, keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Bila dilihat dari bentuk organisasi yang dibentuk di wilayah ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menjalankan misi organisasi, sebagian besar jaringan sosial memperjuangkan aspirasi mereka melalui dan atas nama organisasi tempat mereka berkumpul. Adapun aspirasi yang seringkali disampaikan adalah menyangkut kritikan terhadap jalannya pemerintahan di daerah, memperjuangkan berbagai program pembangunan di wilayah desa/kecamatan masing-masing, pengajuan kegiatan di wilayah desa/kecamatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan, dan tuntutan terhadap perhatian pemerintah terhadap perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah.

Jika dilihat dari aspirasi yang disampaikan di atas sifatnya lebih bersifat normatif, yaitu memperjuangkan kepentingan anggota kelompoknya dan masyarakat tempat dimana organisasi/kelompok sosial ini berada. Hal ini dilakukan dengan harapan penyampaian berbagai aspirasi dan kepentingan melalui

organisasi dirasakan lebih mendapatkan perhatian daripada disampaikan secara individu, oleh karena penyampaian secara kelompok berdasarkan representatif dari masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Melihat kondisi ini maka tidaklah heran perkembangan organisasi/kelompok sosial di daerah ini terus berkembang, bahkan sampai pada terbentuknya kelompok sosial di beberapa wilayah, yang mewakili wilayah tersebut. Salah satu hal yang menarik adalah dalam satu wilayah kecamatan dimana terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut dan membentuk solidaritas tersendiri.

Dalam menjalankan aktifitasnya kelompok sosial ini memiliki kerjasama dan hubungan sosial yang akrab dan bersahaja dengan kelompok sosial yang lain dalam hal kegiatan sosial kemasayarakatan. Sebagai contoh apabila satu kelompok sosial mengadakan kegiatan di salah satu desa, maka penyelenggara kegiatan tersebut mengundang kelompok sosial lainnya untuk bersama-sama terjun atau terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Selanjutnya kelompok yang diundang pun secara sukarela datang membantu kegiatan tersebut hingga sukses. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas antar kelompok sosial di wilayah ini tetap terjaga dengan baik dan tidak mengarah pada hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kerjasama anggota kelompok dan masyarakat yang ada di dalamnya.

## **2. Hasil Kajian pemetaan seluruh kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo**

Pemetaan terhadap kelompok sosial dan jaringan sosial di Kabupaten Boalemo perlu dilakukan untuk memperjelas berbagai aktifitas sosial yang dilakukan. Adapun pemetaan terhadap kelompok sosial berdasarkan aktifitas yang dilakukan dapat ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut: 1) Ekonomi informal.

Bentuk kegiatan yang dilakukan mengarah pada upaya-upaya peningkatan ekonomi di tingkat masyarakat yang disuarakan kepada pemerintah daerah. 2) Keagamaan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan aktifitas keagamaan dengan tujuan meningkatkan aktifitas keagamaan di wilayah Kab. Boalemo, dengan tetap terjaga kerukunan antar sesama umat beragama. 3) Sosial Kemasayarakatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk mendapatkan perhatian pemerintah setempat, baik dalam pembangunan daerah, peningkatan ekonomi masyarakat dan perhatian terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam wilayah tersebut. 4) Kesehatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah aktifitas dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kab. Boalemo melalui penyampaian aspirasi program kegiatan yang dapat ditindaklanjuti oleh kelompok sosial dengan dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait di wilayah ini. 5) Seni. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah aktifitas pembinaan dan peningkatan terhadap aktifitas kesenian di wilayah Boalemo, termasuk seni tradisional yang dianggap sebagai salah satu hal penting dalam membangun ikatan persaudaraan di wilayah Boalemo. 6) Sosial dan budaya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan aktifitas sosial dan budaya di wilayah Boalemo melalui berbagai kegiatan sosial baik dalam wilayah desa/kecamatan maupun antara wilayah yang satu dan wilayah lainnya dalam daerah Kab. Boalemo. Hal ini dilakukan melalui aktifitas kegiatan sosial sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tali silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah ini.



### 3. Hasil Kajian terhadap faktor pendukung dan penghambat harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo

Banyak jumlah penduduk yang mendiami kabupaten Boalemo yang terdiri dari berbagai etnis menuntut kepekaan pemerintah dalam memberikan perhatian, dalam upaya terus meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Kabupaten Boalemo. Disisi lain keinginan masyarakat Boalemo yang terus berkembang mengharapkan adanya percepatan pembangunan di berbagai wilayah kecamatan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat maka mereka membentuk kelompok-kelompok sosial untuk dapat memperjuangkan ataupun menyuarakan aspirasi di berbagai kalangan masyarakat. Harapannya adalah dengan terbentuknya kelompok sosial yang menyuarakan aspirasi secara resmi akan mendapatkan perhatian dan respon yang cepat dari pemerintah dalam hal tindak lanjutnya. Oleh karena banyaknya kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula, maka hal yang perlu diperhatikan tentunya adalah bagaimana menciptakan harmonisasi jaringan sosial ini di tingkat masyarakat, pengurus, sesama kelompok sosial dan dengan pemerintah setempat, mulai dari desa, kecamatan dan daerah. Untuk maksud tersebut maka perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung maupun yang dapat saja menghambat harmonisasi jaringan sosial di daerah ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### Faktor Pendukung dan Penghambat

##### 1). Faktor Pendukung.

Faktor pendukung yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat mendorong pada situasi sosial yang kondusif antara sesama kelompok sosial dan pemerintah setempat. Adapun faktor dimaksud a) Kekeluargaan. Kekeluargaan memegang peranan

penting dalam upaya harmonisasi kelompok sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ikatan kekeluargaan lebih mendominasi daripada ikatan dalam kelompok organisasi sosial. Di wilayah ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, ikatan kekeluargaan masih menjadi prioritas utama yang harus dijaga dalam memperjuangkan aspirasi. Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa interaksi sesama kelompok sosial tidak hanya melalui penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah atau instansi terkait lainnya, namun pada kesempatan lain masyarakat ataupun anggota kelompok sosial ternyata secara bersama-sama juga melaksanakan kegiatan sosial lainnya, misalnya pada acara-acara syukuran keluarga, tetangga atau sesama keluarga di wilayah lainnya. Kegiatan diluar agenda kelompok sosial inilah yang menjadi pengikat ataupun pendukung dalam hal harmonisasi jaringan sosial di daerah ini. b) Perhatian pemerintah. Dalam hal penyampaian aspirasi dari kelompok sosial kepada pemerintah, hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa walaupun belum semua aspirasi dapat dipenuhi, namun tingkat penerimaan untuk menampung aspirasi tersebut dapat diterima oleh masing-masing kelompok sosial. Disamping itu pula, pemerintah dalam hal aspirasi selalu menitikberatkan pada skala prioritas aspirasi yang dapat dipenuhi, juga dengan memperhatikan aspek pemerataan di masing-masing wilayah kelompok sosial. c) Pembinaan Kelompok sosial. Faktor pendukung ini merupakan faktor yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja Kesbang Pol Kab. Boalemo. Dalam kegiatan ini pemerintah secara rutin mengagendakan pertemuan dengan semua organisasi kelompok sosial di wilayah ini untuk mendiskusikan perkembangan pembangunan daerah, berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti untuk menjalin kebersamaan di wilayah Boalemo. Disamping itu pula pertemuan

dilakukan untuk menjaring berbagai ide baru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masing-masing kelompok sosial dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Boalemo. Sisi lain yang terbentuk dalam faktor ketiga ini adalah adanya pertemuan dan komunikasi rutin antara sesama kelompok sosial, sehingga konflik horizontal sesama kelompok sosial dapat diminimalisir bahkan ditiadakan.

## 2). Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dimaksud dalam kajian ini adalah berbagai hal yang dapat membuka peluang pada konflik horizontal sesama kelompok sosial dan konflik vertikal antara kelompok sosial dengan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menghambat harmonisasi jaringan sosial adalah Egosime Sektoral. Egosime sektoral yang dimaksud dalam kajian ini adalah ditekankan pada keinginan yang kuat dari masing-masing kelompok sosial untuk segera merealisasikan aspirasi yang disuarakan. Hal ini jelas sangatlah sulit untuk diwujudkan, karena aspirasi yang diusarakan masih perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam dan juga perlu penyesuaian dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah dalam satu periode pembangunan. Egoisme sektoral juga nampak pada permintaan perhatian terhadap wilayah-wilayah tertentu maupun kegiatan kelompok-kelompok tertentu. Untuk menyikapi ini tentunya pemerintah sangatlah berhati-hati, prinsip yang dikedepankan adalah prinsip prioritas dan skala pemerataan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jaringan sosial di Kabupaten Boalemo dibentuk di beberapa wilayah kecamatan

berdasarkan adanya kepentingan dan aspirasi yang disuarakan dari wilayah-wilayah tersebut, baik untuk menyuarakan kepentingan ekonomi, keagamaan, politik, sosial kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan, seni dan sosial budaya. Interaksi jaringan sosial di Boalemo terbentuk melalui kontrol sosial yang dilakukan dalam pertemuan rutin dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk melakukan diskusi berbagai masalah pembangunan di wilayah Kabupaten Boalemo.

2. Berbagai faktor yang dapat mendukung konsep harmonisasi jaringan sosial di daerah ini meliputi : a) kekeluargaan, b) perhatian pemerintah, c) pembinaan kelompok sosial. Sedangkan faktor yang dapat menghambat adalah egoisme sektoral di masing-masing wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam membangun konsep harmonisasi jaringan sosial masih perlu dilakukan kajian tahap berikutnya tentang bagaimana membangun harmonisasi jaringan sosial Kabupaten Boalemo berdasarkan kondisi sosial wilayah dan berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat.
2. Berdasarkan poin satu di atas maka selanjutnya dapat tersusun konsep aksi harmonisasi jaringan sosial di Kabupaten Boalemo yang telah disusun berdasarkan karakteristik wilayah, yang dapat menunjang kegiatan pelayanan publik di wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Ghalang Indonesia
- Faisal Sanafiah, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

dan aspek...  
 ah-wila...  
 enyuara...  
 an poli...  
 eagama...  
 i. Inter...  
 uk mel...  
 n dala...  
 atan sos...  
 berbag...  
 ah Ka...  
 enduk...  
 di daer...  
 perhati...  
 k sosia...  
 ghamb...  
 g-masin...  
 gaiman...  
 dapa...  
 nonisas...  
 kajian...  
 aiman...  
 sial d...  
 kondis...  
 yang...  
 maka...  
 akhir...  
 upaten...  
 sarkan...  
 njang...  
 i...  
 halia...  
 litian...

encana Inu, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta

draha Taliziduhu, 2003, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta

-----, 2003, *Kybernology 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta

Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Jakarta, Pustaka Pelajar

Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press

Shodiqin Nursa, 2007, *Boeemo Bertasbih, Model Pembangunan Berbasis Masyarakat Madani*, Forum Media Utama

Widodo Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya.